

4-30-1977

Hak-hak Azasi Manusia Dalam Helsinki Declaration

Bacelius Ruru

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Ruru, Bacelius (1977) "Hak-hak Azasi Manusia Dalam Helsinki Declaration," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7: No. 2, Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Dalam Helsinki Declaration

Oleh: Bacelius Ruru.

Pada tanggal 1 Agustus 1975 bertempat di ibukota Finlandia, diadakan suatu konperensi antara negara-negara anggota Pakta Warsawa dan negara-negara anggota NATO, yang dinamakan "*Conference on the Security and Cooperation in Europe*" (disingkat CSCE). Konperensi ini sangat terkenal karena dua blok yang saling berhadap-hadapan dan sering mengadakan konfrontasi bertemu dalam suatu forum untuk mengadakan pembicaraan atau mencari jalan bagaimana caranya mengadakan perbaikan atas situasi yang ada di Eropa. Konperensi ini melahirkan suatu deklarasi yang terkenal dengan nama "*HELSINKI DECLARATION*" yang memuat beberapa prinsip yang berlaku bagi seluruh negara-negara peserta.

Deklarasi Helsinki ini ringkasnya memuat tiga hal pokok (istilah yang dipergunakan adalah "basket"), yaitu:

Basket I memuat ketentuan tentang security di Eropa dimana disebutkan antara lain tentang tidak diperbolehkannya dipergunakan kekerasan dalam menyelesaikan persengketaan; pemberitahuan kepada seluruh peserta apabila akan diadakan suatu latihan perang-perangan serta pertukaran peninjau untuk mengikuti latihan-latihan tersebut;

Basket II berisikan ketentuan tentang kerja sama dalam bidang perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengawasan atas alam sekitar (environment);

Basket III terutama berisikan ketentuan-ketentuan tentang hak azasi manusia misalnya hubungan antara warga negara dari negara yang satu dengan warga negara dari negara lain, pertukaran informasi dan bahan-bahan berita, penyatuan antara keluarga-keluarga yang terpisah, perkawinan antara warga negara, perjalanan dalam rangka penyelidikan ilmu pengetahuan atau maksud pribadi, dan lain-lain masalah yang pada pokoknya berisikan penghormatan semua peserta atas hak-hak azasi manusia.

Dalam kerangka basket II inilah kita akan mengadakan peninjauan dikarenakan issue ini telah menghangat kembali sejak Presiden Carter berkuasa di Gedung Putih. Akan tetapi sebelum kita mengadakan pembahasan termaksud, baiklah kita lihat sebentar latar belakang terbentuknya Deklarasi Helsinki ini.

Latar Belakang

Konperensi tentang Keamanan dan kerja sama Eropa ini merupakan suatu proyek yang telah dirintis oleh Uni Sovyet untuk kurang lebih 20 tahun. Tujuan utama Uni Sovyet dalam melahirkan konperensi ini adalah didapatnya pengakuan dari negara-negara Barat atas situasi Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II, terutama pengakuan atas perbatasan yang ada di Eropa Timur. Dengan kata lain adalah pengakuan negara-negara Barat atas "status quo" yang berlaku.¹⁾ Dengan diperolehnya pengakuan dari negara-negara Barat atas perbatasan-perbatasan yang ada di Eropa tersebut berarti posisi Uni Sovyet makin mantap, sebab negara-negara Barat tidak dapat lagi mengadakan campur tangan apabila Uni Sovyet melakukan suatu intervensi ke negara-negara Eropa Timur tadi seandainya terjadi proses pemisahan diri dari Blok Uni Sovyet²⁾. Disamping itu tujuan Uni Sovyet adalah mengadakan politik "satu front" dalam menghadapi RRC, saingannya yang terbesar dalam kubu negara-negara komunis, sebagaimana yang dilakukan oleh Stalin ketika menghadapi Jepang dalam Perang Dunia II, dengan mengadakan Perjanjian Non Agresi dengan Hitler. Pengakuan negara-negara Barat tadi atas perbatasan-perbatasan sekarang berarti Uni Sovyet dapat lebih leluasa dalam menghadapi masalah-masalah dalam negerinya³⁾ serta RRC.

Demikianlah pada bulan Juli 1966 dalam suatu pertemuan Pakta Warsawa di Bucharest (Rumania), dikeluarkan suatu deklarasi dimana diajukan appeal kepada negara-negara NATO (kecuali Amerika Serikat dan Canada) agar mereka mengakui perbatasan-perbatasan yang ada di Eropa sejak Perang Dunia II (termasuk perbatasan Jerman Timur) serta kerja sama antara negara-negara anggota NATO dan Pakta Warsawa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, kebudayaan dan perdagangan. Negara-negara Barat kurang menanggapi usul Uni Sovyet c.s. ini dikarenakan invasi Uni Sovyet ke Cekoslovakia pada tahun 1968, ketika Dubcek memimpin negaranya untuk mengadakan pembaharuan (liberalisasi). Namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara Barat dalam bidang ekonomi memaksa negara-negara Barat untuk mempertimbangkan sekali lagi usul Uni Sovyet tersebut, karena dengan adanya usul itu, negara-negara NATO dapat merundingkan suatu persetujuan dengan negara-negara Pakta Warsawa tentang di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Demikianlah pada bulan Desember 1969 NATO mengeluarkan suatu Deklarasi (Deklarasi tentang Keamanan Eropa), yang pada pokoknya selaras dengan Deklarasi Bucharest. Namun dalam deklarasi ini, jelas-jelas disebutkan agar diadakan kebebasan yang lebih luas bagi perpindahan orang-orang dari negara yang satu ke negara lain, demikian pula tentang pertukaran informasi dari pendapat⁴⁾.

Perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa antara lain kunjungan Presiden Nixon ke Moskow pada tahun 1972 serta "OOST POLITIEKE" yang dimainkan oleh Perdana Menteri Willy Brandt, mengakibatkan terjadinya pengakuan sebagian besar negara-negara di dunia atas existensi

kedua Jerman. Demikian pula dengan masuknya Jerman Barat dan Jerman Timur sebagai anggota PBB pada tanggal 19 September 1973, mempercepat proses pelaksanaan konperensi puncak Helsinki. Sebelum itu masalah yang masih merupakan duri dalam daging antara Jerman Timur c.s. dan Jerman Barat yaitu masalah perbatasan Oder-Neisse yang terbentang antara Jerman Timur dan Polandia^{4a}) telah diselesaikan oleh Jerman Barat dalam suatu perjanjian masing-masing dengan Moskow dan Warsawa⁵).

Pada tanggal 1 Agustus 1975, Kepala-kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari 33 negara Eropa serta Amerika Utara berkumpul di Helsinki untuk menanda tangani Final Act dari Konperensi tentang Kemananan dan Kerja sama Eropa Conference on the Security and Cooperation in Europe - CSCE), suatu konperensi yang terbesar yang pernah diadakan di Eropa sejak Kongres Wina yang diadakan oleh von Metternich, menyusul kekalahan Napoleon.

Deklarasi Helsinki ini dalam kebanyakan hal dikecam oleh pengulas-pengulas politik negara-negara Barat, dengan mengatakan bahwa negara-negara Barat telah mengakui kelemahan mereka sendiri tanpa mendapatkan imbalan dari Uni Sovyet⁶), bahwa deklarasi Helsinki ini tidak didasarkan atas prinsip "*quid pro quo*"⁷). Menurut pengulas-pengulas tersebut Uni Sovyet telah memperoleh kemenangan yang besar dari deklarasi Helsinki itu, yaitu berupa pengakuan negara-negara Barat atas stautus quo yang berlaku di Eropa Timur.

Demikianlah lahir suatu masa peredaran ketegangan (yang lebih terkenal dengan istilah "detente") secara resmi antara NATO dengan Pakta Warsawa sebagai hasil Deklarasi Helsinki ini, walaupun disana-sini kedua superpower masih sering berkonfrontasi secara insidental di beberapa bagian dunia. Ditambah dengan perundingan-perundingan SALT (Strategic Arms Limitations Talk), lengkaplah sudah peredaran ketegangan itu.

Situasi di Uni Sovyet dan negara-negara Eropa Timur .

Di Uni Sovyet, jauh sebelum ditanda-tanganinya Helsinki Declaration, telah ada pembangkangan terhadap penguasa yang secara drastis ditindas oleh Moskow dengan berbagai-bagai cara. Perlawanan secara pasif atas penindasan yang dilakukan Pemerintah terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan Pemerintah telah lama berlangsung. Benih ini lebih subur lagi ketika Kruschev menjalankan politik "*destalinisasi*", antara lain dengan memberikan sedikit kebebasan kepada warga negara Uni Sovyet. Para pembangkang terhadap penguasa Uni Sovyet terdiri dari beberapa macam golongan. Ada yang menjadikan agama sebagai dasarnya (Gereja Baptis Rusia, Pantekosta, Yahudi), ada pula yang menjadikan latar belakang etnis sebagai dasarnya (kaum minoritas Islam di Asia Tengah) yang menghendaki adanya kebebasan dalam menjalankan kewajiban agamanya. Diantara para pembangkang itu (dalam siaran luar negeri mereka disamakan dengan penjahat biasa) yang paling bersuara kuat adalah golongan minoritas Yahudi dan kaum intelektual. Golongan Yahudi karena

mereka mempunyai dukungan dari rekan-rekannya di seluruh dunia (terutama di Amerika Serikat); golongan intelektual karena kebanyakan dari mereka terdiri dari orang-orang terpelajar yang sebelum terjun ke gelanggang pembangkangan mempunyai reputasi. Contohnya adalah Andrei Sakharov.

Andrei Sakharov adalah seorang ahli nuklir pencipta Bom Hidrogen yang kemudian menjadi salah seorang dissident. Sebagai seorang pencipta Bom H, dia adalah anak emas dari Kremlin, karena itu banyak privilege yang dimilikinya. Akan tetapi sebagai seorang ahli dan pula sebagai seorang manusia, Sakharov tidak luput dari suara hati dan pengetahuan bahwa seandainya terjadi perang nuklir, seluruh umat manusia dan peradabannya akan musnah. Untuk itulah pada tahun 1968 dia menulis suatu karangan yang berjudul "Peace, Coexistence and Intellectual Freedom"⁸). Karangan ini menimbulkan kegoncangan di kalangan penguasa Uni Sovyet karena di dalam buku tersebut Sakharov membentangkan secara terus terang dan berani tentang gagasannya mengenai kebebasan berpikir dan berbeda pendapat dengan partai. Lebih berani lagi, bersama-sama dengan pembangkang lain, dia menyusun suatu petisi kepada Pemerintah agar tahanan politik dibebaskan, sekurang-kurangnya diperlakukan secara wajar. Sudah tentu hal ini tak dapat dibiarkan terus oleh Kremlin: satu demi satu posisinya dicopot. Namun demikian Sakharov masih mempunyai kekuatan untuk terus mengadakan perlawanan secara pasif terhadap penindasan yang dilakukan penguasa. Kekuatan tersebut adalah keyakinannya akan kebenaran dari cita-citanya, disamping keengganan dari penguasa Uni Sovyet untuk menindaknya secara langsung disebabkan jasa-jasanya yang diakui sebagai pencipta Bom H Uni Sovyet.

Pertanyaan yang timbul adalah mengapa pemerintah Uni Sovyet, dalam batas-batas tertentu masih memberi kelonggaran kepada kaum pembangkang untuk terus melancarkan kegiatannya, pada hal kita semua ketahui Uni Sovyet adalah negara polisi dimana orang tidak bebas mengeluarkan pendapat bahkan mempunyai pendapat sendiri.

Seperti diketahui, pada waktu Krushev berkuasa, kebebasan alam tingkat yang sangat kecil telah dicobakan kepada masyarakat Uni Sovyet yang telah lama mengalami masa-masa suram ketika Stalin memegang tampuk pemerintahan. Sedikit kebebasan untuk menggairahkan rakyat telah diberikan Krushev dalam rangka proyek "destalinisasi" untuk membangun negaranya dalam rangka perlombaan dengan Amerika Serikat. Keadaan ini masih diteruskan oleh Leonid Brezhnev sebagai pengganti Krushev. Disamping itu pengaruh dari apa yang terjadi di luar Uni Sovyet sendiri turut mempengaruhi proses pemberian kebebasan kecil ini dengan maksud agar Uni Sovyet dapat memperoleh teknologi dan modal dari negara-negara kapitalis, negara-negara mana dalam mengadakan perjanjian perdagangan dengan Uni Sovyet sering memaksakan pasal-pasal tentang "*perlakuan yang lebih human terhadap mereka yang ditahan*" sebagai akibat perbedaan pendapat dengan pemerintah atau mereka yang ingin keluar dari Uni Sovyet, sebagaimana yang sering diusulkan oleh Senator

Henry Jackson dari Amerika Serikat dalam hal perdagangan bilateral antara Amerika Serikat - Uni Sovyet. Oleh karena itu para pembangkang tersebut walaupun sebenarnya telah merupakan duri dalam daging, mereka masih dibiarkan (dalam batas-batas tertentu) untuk melakukan kegiatan mereka. Penumpasan terhadap mereka akan merupakan pengulangan dari apa yang dilakukan Stalin, dan ini tidak dikehendaki oleh penguasa Kremlin, karena hal ini juga sekaligus akan dapat menjauhkan negara-negara Barat dari rangkulannya Uni Sovyet. Pembasmian secara menyeluruh mungkin baru dilakukan apabila tindakan-tindakan para pembangkang tersebut sudah menjerumus ke arah pemberontakan terbuka ataupun tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Dan ini selalu dihindarkan oleh para pembangkang tersebut, mereka melakukan perlawanan secara pasif saja.

Situasi yang terjadi di Uni Sovyet, dalam batas-batas tertentu dijumpai pula di negara-negara Eropa Timur. Akan tetapi agak berbeda dengan rekan-rekan mereka di Uni Sovyet dalam hal strategi perjuangan, kaum pembangkang negara-negara Eropa Timur menggunakan nasionalisme sebagai dasarnya, walaupun disana-sini dapat dijumpai pula adanya persamaan, misalnya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sendiri. Nasionalisme sebagai dasarnya maksudnya adalah bahwa kaum pembangkang tersebut bercita-citakan untuk melepaskan diri dari genggaman Uni Sovyet. Akan tetapi pengalaman yang dialami Hongaria dan Ceko-Slovakia (masing-masing tahun 1956 dan 1968) dalam usaha mereka untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Sovyet diusahakan untuk jangan terulang lagi. Manuver-manuver yang dilakukan kaum pembangkang sejauh ini masih bersifat kelompok-kelompok kecil (tanpa dukungan Pemerintah) ataupun Partai.

Baru-baru ini di Ceko-Slovakia kaum intelektual telah membuat suatu petisi yang disebut Charter 77. Penyusun charter tersebut antara lain adalah Alexander Dubcek, bekas Sekretaris Jenderal Partai Komunis Ceko-Slovakia yang pada tahun 1968 memimpin proses liberalisasi pendek dan yang mengakibatkan pendudukan (penyerbuan) negara-negara Pakta Warsawa. Charter 77 berisikan seruan kepada pemerintah Ceko-Slovakia untuk menerapkan persetujuan Helsinki tentang hak-hak azasi manusia (basket III). Akan tetapi charter ini telah menimbulkan kemarahan pemerintah. Yang menanda tangani Charter tersebut antara lain Vaclav Havel, Frantisek Pavlicek, Jiri Lederer, dan lain-lain telah ditangkap dan akan diadili dengan tuduhan melakukan kegiatan subversi. Hal serupa dalam tingkat yang berbeda-beda terjadi pula di Polandia, Rumania, Jerman Timur, Hongaria dan Bulgaria. Di Polandia, belum lama berselang terjadi suatu demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh setempat sebagai protes atas kenaikan harga yang mengakibatkan sejumlah kaum buruh ditangkap. Kaum intelek Polandia memprotes dengan cara mengorganisir masyarakat umum untuk mengadakan protes secara terbuka dengan dukungan pemimpin gereja Katolik. Seandainya pemerintah tidak turun tangan untuk mengatasi masalah penahanan kaum buruh serta

masalah kenaikan harga, gabungan ketiga kelompok ini — buruh, kaum intelektual serta Gereja — akan menimbulkan kesulitan yang besar bagi Pemerintah. Tindakan ini dapat memancing intervensi Uni Sovyet.

Munculnya Carter

Terpilihnya Jimmy Carter sebagai Presiden Amerika Serikat banyak pengaruhnya terhadap masalah hak-hak azasi manusia. Sebagai seorang Presiden yang berasal dari keluarga beragama, dia sangat memperhatikan nasib sesamanya, bahkan sering tindakan Carter ini dipandang sebagai kontroversial karena terlalu mementingkan masalah hak azasi sehingga masalah-masalah yang lebih penting sering kurang diperhatikan.

Ketika Ford masih berkuasa di Gedung Putih dengan Kissinger sebagai arsitek politik luar negerinya, masalah (issue) hak-hak azasi manusia di Uni Sovyet (dunia) kurang diperhatikan. Alasan Kissinger adalah bahwa masalah tersebut merupakan masalah dalam negeri yang jika disentuh akan dapat mengganggu detente antara Amerika Serikat — Uni Sovyet. Berlainan dengan Kissinger, Carter mempergunakan issue ini sebagai suatu "bargaining position" dalam menghadapi Uni Sovyet. Sebagai seorang yang mencita-citakan perdamaian, serta penghargaan penuh terhadap hakekat seorang manusia sudah tentu apa yang terjadi di Uni Sovyet dan bagian dunia yang lain tidak akan terlepas dari perhatiannya. Namun demikian hal ini bukanlah berarti bahwa Carter benar-benar tidak memperhatikan masalah-masalah lain disamping hak azasi manusia. Perundingan-perundingan tentang pembatasan senjata strategis (Strategic Arms Limitations Talks * SALT) sedang diusahakan untuk dilanjutkan kembali sejak dibekukan oleh Ford pada masa kampanye pemilihan presiden 1976. Disinilah letak kekuatan dari Carter dalam hubungannya dengan Uni Sovyet, yang sekaligus hendak melaksanakan dua hal: pelaksanaan basket III Helsinki Deklaration serta masalah-masalah lain dalam rangka hubungan bilateral mereka antara lain SALT.

Realisasi pertama Presiden Carter atas pelanggaran hak azasi manusia⁹⁾ terutama yang dilakukan penguasa Uni Sovyet adalah penangkapan oleh agen KGB (dinas rahasia Uni Sovyet) atas diri Yuri Orlov, seorang ahli ilmu alam yang mengepalai suatu komite tidak resmi (terdiri dari beberapa orang terkemuka antara lain Andrei Sakharov) untuk mengusahakan pelaksanaan basket III Helsinki Declaration di Uni Sovyet. Reaksi Presiden Carter ini mendapat kecaman yang keras dari Kremlin, dengan mengatakan bahwa Carter telah melanggar masalah dalam negeri (Domestic Affairs) dari Uni Sovyet. Seakan-akan sebagai suatu tantangan apakah memang benar-benar Carter serius dalam masalah hak azasi manusia di Uni Sovyet, agen-agen KGB menangkap pula Alexander Ginzburg, seorang penyair pembangkang.

Tetapi apakah memang benar-benar Carter telah melanggar masalah dalam negeri Uni Sovyet, dengan kata lain apakah Carter mempunyai hak

untuk melakukan tindakannya itu? Sebenarnya memang benar demikian. Carter mempunyai hak untuk campur tangan dalam masalah ini, dikarenakan basket III dari Helsinki Declaration membenarkannya. Dengan demikian sebuah negara peserta yang memperlakukan persoalan hak azasi manusia di negara peserta konferensi Helsinki yang lain tidak dapat dipandang lagi sebagai campur tangan atas masalah dalam negeri (domestic affair) nya, karena semua peserta telah berjanji untuk melaksanakan hasil-hasilnya.¹⁰⁾

Reaksi keras Uni Sovyet hanyalah merupakan suatu reaksi yang terutama di tujukan kepada kaum pembangkang agar mereka jangan terlalu berbesar hati dengan dukungan Carter, oleh karena Kremlin khawatir bahwa gerakan mereka akan menyebar secara luas ke negara-negara Eropa Timur lainnya, yang sampai saat ini selalu menantikan adanya situasi yang cocok untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Sovyet.

Manuver-manuver Carter dalam membantu gerakan kaum pembangkang Uni Sovyet seperti dikatakan di atas tidak semata-mata dengan melakukan pengingkaran atau melalaikan masalah-masalah lain yang lebih penting lagi. Perundingan-perundingan dalam rangka SALT tetapi diusahakan untuk dilanjutkan kembali, karena masalah ini sangat bermanfaat baik bagi Amerika Serikat, dan terutama bagi Uni Sovyet. Biaya yang sangat besar untuk persenjataan dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak, misalnya untuk mengatasi masalah pengangguran, krisis energi, dan lain-lain di Amerika Serikat; sedang bagi Uni Sovyet biaya untuk persenjataan dapat dialihkan untuk mengatasi masalah pangan dan krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Disinilah Carter mempergunakan kesempatan se-baik-baiknya; membantu kaum pembangkang dalam masalah hak azasi manusia sekaligus mengusahakan agar perundingan SALT dilanjutkan lagi, disamping masalah-masalah yang lain.

Kesimpulan

Masalah yang timbul sekarang ini adalah apakah dengan tindakan Carter itu kaum pembangkang telah memperoleh bantuan yang dalam arti sebenar-benarnya berguna bagi mereka? Kita sadari bahwa Uni Sovyet dalam menjalankan politik luar negerinya selalu bersifat kaku (rigid). Setiap kali dia melakukan campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain (entah melalui organ resmi atau partai) seperti yang dilakukannya dengan perantaraan pasukan Cuba di Angola belum lama berselang. Tindakan Sovyet ini telah merubah perimbangan kekuatan di belahan dunia tersebut berupa perubahan atas politik luar negeri Amerika Serikat¹¹⁾. Sikap dan tindakan Carter dalam membantu gerakan hak-hak azasi manusia di Uni Sovyet bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketegangan baru antara kedua superpower itu karena Uni Sovyet, seperti dikatakan tadi, selalu bersifat kaku dalam menjalankan politik luar negerinya. Dia tidak dapat dipaksa untuk berada dalam suatu keadaan "*fait accompli*."

Seandainya hal ini terjadi ada 3 alternatif yang dapat dilakukan Uni Sovyet, yaitu:

1. Membalas (mengadakan reprisals) tindakan Amerika Serikat dengan mengadakan campur tangan atas masalah dalam negeri Amerika Serikat. Akan tetapi dalam kaitannya dengan hak azasi manusia, masalah ini kurang mempunyai relevansi dengan situasi yang ada sekarang di Amerika Serikat
2. Menjabat sampai habis kaum pembangkang (entah dengan meng-siberikan, membunuh, dan lain-lain cara). Kemungkinan yang kedua Juga sulit dilaksanakan mengingat bahwa pembasmian secara menyeluruh atas kaum pembangkang berarti mengembalikan situasi pada saat Stalin berkuasa yang dapat mengakibatkan reaksi berantai. Partai Komunis negara-negara Eropa Barat (Euro-communist) dalam usaha mereka untuk berkuasa telah mengisssuekan bahwa mereka adalah "*independent communist*", dalam arti terlepas dari bayangan Moskow. Pembasmian atas kaum pembangkang di Uni Sovyet akan lebih menjauhkan mereka dari Moskow. Bukan hanya Partai Komunis negara-negara Eropa Barat saja yang akan menjauhkan Uni Sovyet. Negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat dengan Presiden Carter) akan menjauhkan diri pula dan hal ini dapat melahirkan suatu perang dingin yang baru.
3. Kemungkinan yang terakhir yang lebih favourable bagi Moskow adalah mengalihkan perhatian Amerika Serikat dari masalah dalam negeri Uni Sovyet dengan jalan membuka front baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum ada pengaruh baik dari Uni Sovyet atau Amerika Serikat. Hal ini jelas terlihat pada pemberontakan di Zaire dimana Moskow memberikan bantuan persenjataan (bahkan pula personil militer Cuba). Kemungkinan ketiga ini dikatakan lebih favourable disebabkan situasi yang relatif tidak stabil di benua hitam tersebut sebagai suatu wilayah yang baru lepas dari penjajahan.

Nampak-nampaknya Uni Sovyet seperti dikatakan diatas, berada dalam suatu dilemma antara melaksanakan apa yang telah disetujuinya di Helsinki pada tanggal 1 Agustus 1975 seperti yang terkandung dalam basket III Helsinki Declaration atau mengganggu Amerika Serikat dengan masalah-masalah lain yang dapat menyita perhatiannya dari masalah hak azasi manusia di Uni Sovyet. Namun hal ini cukup berbahaya mengingat bahwa Amerika Serikat tidak dapat membiarkan kehilangan pengaruhnya begitu saja di bagian-bagian dunia ini.

Quo vadis detente?

CATATAN:

1. Dengan diakuinya perbatasan-perbatasan yang ada di Eropa Timur dan Eropa Barat pada umumnya berarti bahwa secara resmi wilayah yang diperoleh negara-negara Eropa Timur sesudah Perang Dunia II dan sesudahnya (misalnya Danzig, yang merupakan bagian dari wilayah Oder - Neisse yang sebelumnya merupakan wilayah Jerman) tak dapat diganggu gugat lagi.
 2. Penyerbuan negara-negara Pakta Warsawa ke Cekoslovakia dalam tahun 1968 adalah akibat dari proses liberalisasi yang dilakukan oleh Alexander Dubcek. Juga dalam rangka Doktrin Brezhnev (limited Sovereignty). Lihat Harold S. Russel, "The Helisinki Declaration: Brobdingnag or Liliput?" - American Journal of International Law - AJIL Vo. 70 No. 2, April 1976, hal. 253 dst.
 3. Antara lain masalah kaum pembangkang (dissident) ini.
 4. Harrold S. Russel, op. cit., hal. 245.
 - 4a. Jerman Barat selalu mengklaim bahwa dialah satu-satunya negara yang berdaulat atas seluruh Jerman. Oleh karena itu wilayah yang dianeksir oleh Polandia (Danzig) dianggap sebagai harus dikembalikan kepada Jerman dalam hal ini Jerman Barat bukan Jerman Timur.
 5. Sebagai realisasi dari OOST POLITIEK dibuatlah perjanjian antara Jerman Barat dan Polandia dalam suatu perjanjian tentang Dasar-dasar untuk Normalisasi Hubungan (Treaty concerning Basis for Normalizing Relations). Harold S. Russel, op. cit. hal. 242.
 6. NEWSWEEK, edisi tanggal 11 Agustus 1975.
 7. Arti dalam bahasa Indonesia adalah "Sesuatu untuk Sesuatu", yang dalam Hukum Internasional Publik merupakan dasar dari azas "reciprocity."
 8. TIME, edisi tanggal 21 Pebruari 1977
 9. Sebenarnya reaksi Carter tersebut bukan saja pelanggaran hak azasi manusia di Uni Sovyet, tetapi juga di negara-negara lain, termasuk sekutu Amerika Serikat misalnya Korea Selatan.
 10. Harold S. Russel, op. cit., hal. 260.
 11. Tentang Perimbangan kekuatan (Balance of Power) lihat Hans J. Morgenthau, "Politics Among Nations", sedang tentang strategy politik luar negeri Amerika Serikat, lihat Bernard K. Gordon, "Toward Disengagement in Asia" - A Strategy of American Foreign Policy - Prentice Halls, Inc. New Jersey.
-